

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anugerah, Pradana dan Pangerang, Moenta, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Masturi, Suriyaman, 2020, *Hukum Adat, Dulu, Kini dan Akan Datang*, Cetakan ke-5 Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nugroho, Sigit Spto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Iltizam, Solo.
- Poerwodarminto, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Satrio J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun KBBI, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wingjodipuro, Surojo, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Presiden Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas \pm 313,99 (Tiga Ratus Tiga Belas dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) Hektar di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9.

C. Jurnal dan Penelitian

Akhsan, Amir Muhammad, "Peranan Pappasang Sebagai Sumber Hukum Dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antropologi Hukum)", *Skripsi Departemen Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi*, Makassar, 2017.

Amiruddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Petikum* Vol. 1, No. 1, April 2014.

Arizona, Yance, Wicaksono Trenggono Muki, Vel Jacqueline, "The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forest in Indonesia" *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 20, No. 5, 2019.

Barnasaputri, Ikhana Indah, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Derah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai", *Jurnal Notaire*, Vol 4, No. 1, Februari 2021.

- Fitriani, Andi, “Eksistensi Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Pengelolaannya di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan”, *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2003.
- Hafid, Abdul, “Sistem Kepercayaan pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, *Jurnal Patanjala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Ismi, Hayatul, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Permata Dyah, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Of Intellectual Property*, Vol.1, No. 1, 2018.
- Raja, Nur Azizah, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT.PP. London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba), Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 12, No. 1, Januari 2019.
- Rusdiansyah, “Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang”, *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Thontowi, Jawahir, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 20, Januari 2013.
- Yusuf Andi Muslim, “Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam” *Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 02, No. 1.

D. Internet

- Abby Wijaya, “Pengertian Konflik Menurut Para Ahli”
<https://adjar.grid.id/read/542904746/pengertian-konflik-menurut-para-ahli?page=all>, diakses pada hari Selasa tanggal 30 November 2021.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,

<https://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia>, diakses pada hari
Senin 1 Nopember 2021.

BRWA, “Wilayah Adat Ammatoa Kajang”

<https://brwa.or.id/wa/view/clpRWmgzd2VqLVk>, diakses pada hari Selasa,
tanggal 8 Juni 2021.

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli” tesishukum.com,

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada hari
Kamis 22 April 2021.

Mongabay, “Sengkarut Lahan Warga Kajang dan Lonsum Berlarut”

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/02/sengkarut-lahan-warga-kajang-dan-lonsum-berlarut/> diakses pada hari Senin 7 Juni 2021.

Musdalifah, “Jurnal Disertasi Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan
Perkebunan Dengan Masyarakat (Kasus Konflik Antara Petani dengan
PT.PP Lonsum di Kabupaten Bulukumba)”

[http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f37a36b6ee43f77056c67e2905ac9798.p
df](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f37a36b6ee43f77056c67e2905ac9798.pdf), diakses pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021.

Penelitian Ilmiah, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>, diakses pada
hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022.

Rian Tinages, “Perbedaan Teknik Analisis Data Kualitatif vs Kuantitatif”, dqlab.id,

[https://www.dqlab.id/perbedaan-teknik-analisis-data-kualitatif-vs-
kuantitatif](https://www.dqlab.id/perbedaan-teknik-analisis-data-kualitatif-vs-kuantitatif), diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021.

Yulia, “Buku Ajar Hukum Adat”,

[https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%20ADAT-
%20Dr%20Yulia.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%20ADAT-%20Dr%20Yulia.pdf), diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021.